

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN
NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KELURAHAN GEDUNG JOHOR**

SKRIPSI

OLEH:

AULIA NINGTYAS

NPM : 19.8520.032



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/23

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN
GEDUNG JOHOR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

AULIA NINGTYAS

NPM : 19.8520.032

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/23

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Gedung Johor

Nama Mahasiswa : Aulia Ningtyas


Npm : 19.8520.032

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Nina Angelia S.Sos,M.Si


Pembimbing I


Marlina Deliana S.AB,M.AB

Pembimbing II


Mengetahui




Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan Fakultas ISIPOL




Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.Pol

Ka. Prodi Administrasi Publik

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Aulia Ningtyas
NPM : 19.8520.032
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Gedung Johor" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

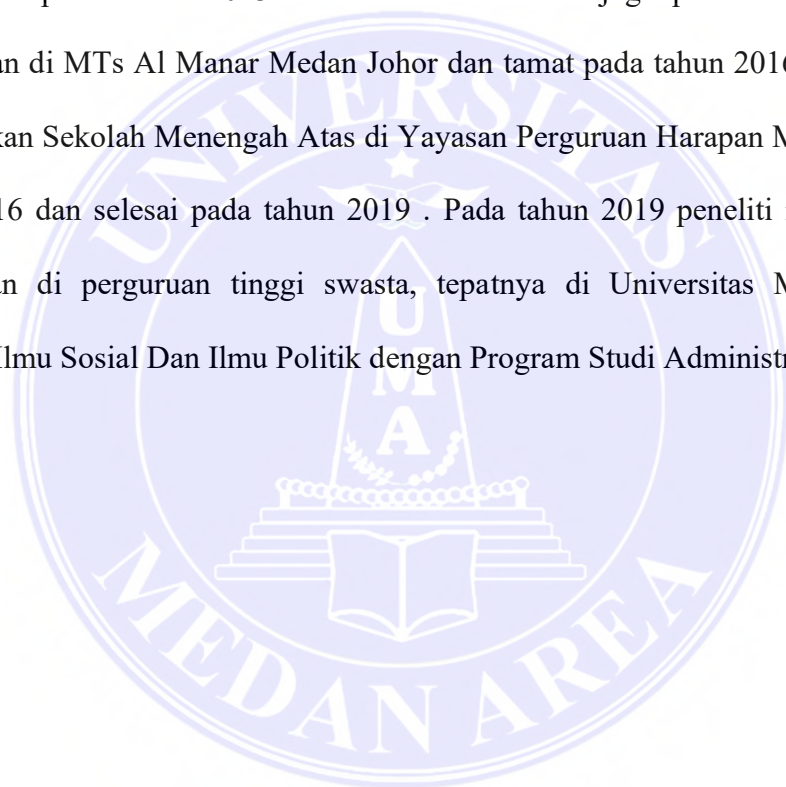
Medan, 22 Agustus 2023


Aulia Ningtyas
19.8520.032



RIWAYAT HIDUP

Aulia Ningtyas, dilahirkan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 20 Februari 2002. Saya merupakan anak kedua dari satu bersaudara pasangan dari Syamsir Saidi Lolo dan Susliani Kasio. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 067952 Medan di Kecamatan Medan Johor dan lulus pada tahun pada tahun 2013. Pada tahun tersebut juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MTs Al Manar Medan Johor dan tamat pada tahun 2016 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Yayasan Perguruan Harapan Mandiri pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019 . Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Program Studi Administrasi Publik



ABSTRAK

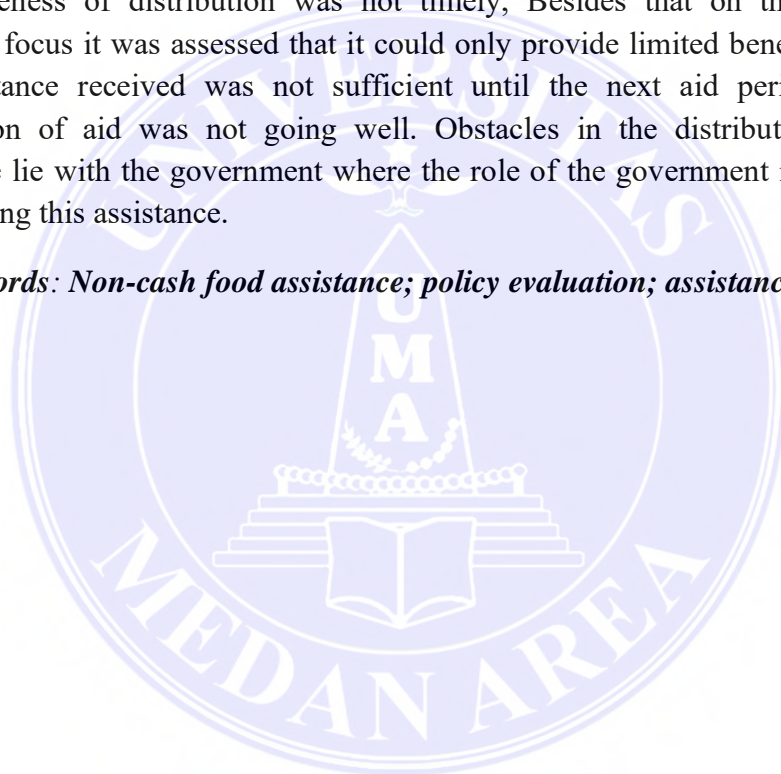
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Masyarakat tidak mampu dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui kantor pos. Namun dalam pelaksanaannya BPNT masih menuai banyak permasalahan dan kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program serta hambatan pada program BPNT di Kelurahan Gedung Johor. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dari will. N. Dun yakni efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa program tersebut dinilai belum optimal dan baik secara keseluruhan. Pada lima Indikator dalam pengujiannya terdapat tiga indikator yang tidak berjalan dengan optimal. Ketidakefektifan dengan penyaluran yang tidak tepat waktu, selain itu pada aspek fokus kecukupan dinilai BPNT hanya dapat memberikan manfaat secara terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup hingga periode bantuan selanjutnya serta pemerataan bantuan menjadikan program tersebut tidak berjalan dengan baik. Hambatan dalam penyaluran bantuan pangan ini berada pada pemerintahnya peran pemerintah sangat besar dalam pemberian bantuan tersebut mulai dari, pengawasan, pemberian bahkan perekrutan penerima bantuan semua berada pada pihak pemerintah sehingga banyaknya tugas yang didapat sehingga terjadi beberapa ketidakefektifan dalam penyaluran bantuan pangan tersebut mulai dari pemerataan, kecukupan serta keefektifan penyaluran bantuan.

Kata Kunci: Bantuan pangan non tunai; evaluasi kebijakan; program bantuan

ABSTRACT

Non-Cash Food Assistance (BPNT) is food assistance that is distributed non-cash from the government to underprivileged communities with the mechanism of distributing aid through the post office. In its implementation, there are still many obstacles. This study aims to evaluate the programs and obstacles to the BPNT program in Kelurahan Gedung Johor. The type of research in this research is descriptive qualitative. The theory used comes from William N. Dun namely effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of this study found that the program was considered not optimal and good overall. Of the five indicators tested, three indicators have not worked optimally. The ineffectiveness of distribution was not timely, Besides that on the aspect of adequacy focus it was assessed that it could only provide limited benefits because the assistance received was not sufficient until the next aid period and the distribution of aid was not going well. Obstacles in the distribution of food assistance lie with the government where the role of the government is very large in providing this assistance.

Keywords: Non-cash food assistance; policy evaluation; assistance program



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya yang sangat luar biasaya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “ **Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Gedung Johor**”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan serta keterbatasan dalam skripsi yang telah ditulis ini baik dari bahasa, isi dan penulisannya . namun dengan demikian penulis sudah melakukan semaksimal mungkin untuk memberikan hasil sebaik mungkin. Dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Motivasi, masukan yang bersifat konstruktif, dan juga doa yang telah diberikan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu membuat skripsi ini, diantaranya:

1. Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M,I,Pol selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Ibu Nina Angelia S.Sos,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana SAB.MAB selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Fathin Abdullah SH,M.Hum selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Ibu Sri Surya Ningsih SE serta staf yang telah mengizinkan penelitian di Kantor Kelurahan Gedung Johor
9. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
10. Kepada orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan penuh dalam pendidikan penulis, memberikan bimbingan, doa yang tulus serta dukungan materi hingga selesai.
11. Kepada kakak, abang dan keponakan- keponakan penulis yang selalu senantiasa memberi semangat dalam masa pendidikan.
12. Teman-teman mahasiswa Administrasi Publik stambuk 2019, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa

bermanfaat dalam dunia pendidikan Indonesia. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Keridhoan-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 22 Agustus 2023

Aulia Ningtyas

19.8520.032



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian..... 10

1.4 Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

2.1 Evaluasi Program 12

2.1.1 Model Evaluasi Program. 14

2.1.2 Tujuan Dan Manfaat Evaluasi Program..... 16

2.2 Konsep Kebijakan Publik..... 17

2.3 Kemiskinan 19

2.3.1 Penyebab Kemiskinan 21

2.4 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)..... 23

2.4.1 Tujuan, Manfaat, dan Prinsip Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)..... 24

2.4.2 Besaran Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)..... 26

2.4.3. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	27
2.5 Definisi Konsep.....	27
2.6 Penelitian terdahulu	29
2.7. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Bentuk Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Jadwal Penelitian	36
3.4 Informan Penelitian	37
3.5 Teknik pengumpulan data	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Sejarah Singkat Kelurahan Gedung Johor.....	42
4.2 Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Gedung Johor.	46
4.2.1 Efektivitas program	48
4.2.2 Kecukupan Program.....	53
4.2.3 Pemerataan program.....	63
4.2.4 Responsivitas masyarakat terhadap program.....	68
4.2.5 Ketepatan Sasaran Program.....	75
4.3 Hambatan Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Gedung Johor.	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN DOKUMENTASI 92



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan kemiskinan (P2) di Kota Medan Tahun 2017-2021	4
Table 2.2 Indikator Evaluasi Kebijakan (soebarsono,2005)	12
Tabel 2.3 Perbandingan Beberapa Penelitian	24
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	30
Tabel 4.1 Informasi dan Presentasi Wilayah Kelurahan Gedung Johor	35
Tabel 4.2 Daftar Nama- Nama Lurah Yang Pernah Menjabat	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wilayah Kelurahan Gedung Johor	35
Gambar 4.2 Kantor Kelurahan Gedung Johor	70
Gambar 4.3. Kantor Pos Sebagai Tempat Penyalur Bantuan BPNT.....	70
Gambar 4.4 Wawancara Bersama Ibu Sri Selaku Sekretaris Kelurahan Gedung Joho	71
Gambar. 4.5 Wawancara Dengan Ibu Rina Selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Gedung Johor	71
Gambar 4.6 Wawancara Dengan Ibu Rika Selaku Kepling LK VIII	72
Gambar 4.7 Wawancara Dengan Ibu Hanum Selaku Kepling LK IV	72
Gambar 4.8 Wawancara Dengan Ibu Suarni (Keluarga Penerima Manfaat)	73
Gambar 4.9 Wawancara Dengan Ibu Imas (Keluarga Penerima Manfaat)	73
Gambar 4.10 Wawancara Dengan Ibu Fitri (Keluarga Penerima Manfaat)	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4 Kerangka Berfikir Tabel.....	28
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Gedung Johor	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah sukses melaksanakan berbagai adaptasi yang mana merupakan upaya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya mengurangi penduduk di bawah garis kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan keberhasilan yang luar biasa. Menyadari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup *absolut* yang menimbulkan dampak *negative* yang cukup fatal baik dalam pembangunan dan integrasi nasional secara umum. Pemerintah mulai memunculkan kembali program - program pengentasan kemiskinan dan ketidakmerataan sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan (Sutyastie,2002). Kemiskinan yang terjadi di dalam suatu negara memang perlu diperhatikan sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena dimasa era globalisasi saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang terjadi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi,

kurangnya akses terhadap sumber- sumber tertentu, kebutuhan sosial serta pendapatan (Maipita, 2013).

Masalah kemiskinan menjadi masalah kompleks yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh berbagai Negara. Menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12).

Menurut Undang- undang No 13 Tahun 2011 mengenai Penangan Fakir Miskin menjelaskan mengenai fakir miskin dimana mereka berhak memperoleh kecukupan, baik pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lainnya. Dengan demikian pemerintah berkewajiban memberikan jaminan hak fakir miskin tersebut dengan melakukan tindakan penanganan dengan asas kemanusiaan, non diskriminasi, kesejahteraan yang terjamin, keadilan sosial dan pemberdayaan. Asas tersebut terdapat dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2011. Pada pasal 7 poin B dijelaskan bahwa salah satu untuk penanggulangan sebagai wujud bantuan pemerintah kepada fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan pangan. Dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah mulai membangun beberapa program- program dalam upaya untuk memberantas kemiskinan, yang ada di Indonesia sendiri di antara program- program tersebut ada yang masih berjalan adapun yang gagal dalam pelaksanaannya program program tersebut berupa : (1) Program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yaitu seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), (2) Program berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu seperti Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), (3) Program perlindungan sosial yaitu seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras Sejahtera untuk orang miskin (Rastra) dan Bantuan langsung (BLT).

Saat ini program yang masih berjalan saat ini adalah program bantuan berupa bantuan pangan. Salah satunya adalah program beras sejahtera dimana program ini berlangsung sejak tahun 2002 namun sayangnya selama berjalannya program tersebut mengalami beberapa permasalahan yang cukup kompleks, yang mana ada indikator sebagai alat ukur keberhasilan program tersebut namun tidak mencukupi untuk itu indikator keberhasilan Rastra diukur melalui 6T yaitu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat waktu. Berpacu dengan 6T tersebut dalam indikator pertama tepat sasaran, program Rastra dimana masih ada rumah tangga yang seharusnya tidak berhak menerima rastra namun menerima bantuan tersebut, sedangkan yang seharusnya dapat bantuan tersebut malah tidak menerima. Pada indikator kedua tepat jumlah, beras dibagi rata, jumlah yang seharusnya diterima kurang dan harga tebus lebih tinggi. Indikator ketiga tepat waktu, masih sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman ataupun pendistribusian bahan pangan beras yang seharusnya dilakukan setiap bulan.

Dengan demikian pemerintah mulai melakukan rancangan untuk mengganti program tersebut demi meningkatkan efektifitas dalam pemberian bantuan pangan kepada rakyat miskin. Pada tahun 2017 mulai disepakati bahwa program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial ini diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana bantuan ini dilakukan melalui non tunai (E-

voucher teknologi terbaru dalam mendukung program tersebut), sehingga tepat akan sasaran penerima bantuan tersebut. Pemberian bantuan pangan dalam bentuk non tunai diharapkan dapat mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung dan juga dapat memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan (Kemensos RI, 2017). Persebaran bantuan tersebut dilakukan di beberapa kota yang ada di Indonesia dimana ada beberapa kota yang memasuki kategori untuk mendapatkan bantuan tersebut, pada tahun 2018 berdasarkan data yang ada, sekitar 44 kota di Indonesia menjadi target bantuan tersebut dan pada tahun 2022 tercatat 48 kota yang sudah menjadi kota penerima bantuan tersebut salah satunya adalah kota medan.

Kota Medan adalah kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, dimana dengan keadaan ini maka keadaan masyarakatnya juga cukup kompleks salah satunya adalah kemiskinan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadikan pemerintah pusat tidak begitu memiliki beban yang berat. Berdasarkan asas otonomi daerah dimana adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dengan adanya sistem pemerintahan yang desentralistik sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan yang ada di setiap daerah di Indonesia karena daerah dapat kewenangan untuk menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa keikutsertaan atau campur tangan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dan tugas

pembantuan dalam pelaksanaannya di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang pemerintah daerah.

Pada Undang- Undang tersebut membahas mengenai dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan tanggung jawab dalam berbagai urusan di Pemerintahan Pusat kepada Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintahan Pusat, serta kepada instansi vertikal yang ada di wilayah tertentu . Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008. Kemiskinan di perkotaan disebabkan karena adanya lapisan- lapisan yang mendominasi dan bertingkat- tingkat dalam pengaturan kesejahteraan, kehidupan masyarakatnya, tingkat kemiskinan rumah tangga di perkotaan dapat dilihat melalui pengeluarannya dan pendapatannya. Daya beli yang rendah akibat pendapatan yang rendah sehingga adanya pengalihan dari pendapatan yang seharusnya di belanjakan untuk kebutuhan pangan atau pokok maka akan dialihkan ke kebutuhan hidup lainnya. Terkhusus di Kota Medan, kemiskinan rumah tangganya dapat di persentase selama lima tahun terakhir. Berikut angka persentase kemiskinan yang ada di Kota Medan:

Table 1.1 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan kemiskinan (P2) di Kota Medan Tahun 2017-2021.

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks keparahan Kemiskinan (P2)
2017	9,28%	1,56	0,41
2018	10,79%	1,50	0,39
2019	8,63%	1,16	0,25
2020	9,14%	1,08	0,23
2021	8,49%	1,10	0,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

Persentase kemiskinan pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan, dilanjutkan pada tahun 2019 angka kemiskinan menurun beberapa persen namun dapat dilihat pada tahun 2020 persentase kemiskinan kota medan meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya wabah yang menyerang yakni *Covid-19*. Segala aktivitas perekonomian yang ada berhenti sehingga hal inilah menjadikan faktor tingginya angka kemiskinan, dan pada tahun 2021 angka kemiskinan mulai menurun karena masyarakat mulai bangkit untuk memperbaiki perekonomiannya namun tidak dapat menutup kemungkinan bahwasannya tidak semua masyarakat mampu untuk bangkit kembali, bahkan ada yang sudah miskin semakin miskin. Kota medan mendapat bantuan BPNT ini mulai direalisasikan semenjak januari tahun 2017 karena telah dianggap sebagai kota yang sudah siap untuk menerima program tersebut dimana telah siap dalam aspek fasilitas maupun akses dalam mendukung penyaluran bantuan tersebut. Pada tahun 2020 karena adanya pandemi *Covid-19* demi meminimalkan dampak sosial terhadap bencana tersebut, pemerintah mulai menyempurnakan program BPNT yang merupakan bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dalam bidang pangan seperti beras, telur dan bahan pokok lainnya. Pada masa ini akhirnya berdasarkan kebijakan stimulus *fiscal* program BPNT ini bertransformasi menjadi program Sembako dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal. Melalui perluasan kepesertaan Program Sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga,

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Namun demikian, untuk memaksimalkan peran program, beberapa perbaikan diperlukan, yang didasarkan pada pengalaman pelaksanaan BPNT yang dimulai sejak 2017.

Program BPNT dengan program sembako merupakan program yang dikeluarkan pemerintah yang tujuannya sama- sama membantu rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhannya bedanya, pada masa pandemi demi meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat miskin maka item yang dapat ditukarkan tidak hanya beras dan telur saja namun juga untuk sumber karbohidrat , protein dan vitamin lainnya seperti, kacang- kacang, sayuran, buah- buahan daging ayam dan lainnya selama sesuai dengan jumlah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Pada masa pandemi Covid-19 jumlah bantuan meningkat yang semula Rp. 110.000 per bulan menjadi Rp. 200.000 per bulan dengan harapan bantuan ini dapat mengurangi beban pengeluaran dalam hal pangan dan menjamin terpenuhinya akan kebutuhan dasar masyarakatnya (Kemenkeu RI,2020). Pada tahun 2017 dimulainya program Bantuan Pangan Non Tunai ini disalurkan melalui kerjasama terhadap pihak ketiga yakni bank serta Warung Elektronik Gotong Royong (E warong). E-warong menjadi *alternative* pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sistem ini segala bantuan sosial juga subsidi akan disalurkan secara non tunai menggunakan sistem perbankan, hal ini dilakukan demi menghindari penyimpangan juga pemerintah dapat mengontrol setiap penyaluran bantuan apakah sudah tepat sasaran, jumlah serta waktu. E-warong juga bisa menjadi mini ATM (*Automatic*

Teller Machine) yang mana menjadi tempat pencarian bantuan sosial tunai, bantuan non tunai (sembako), buku tabungan, setoran dan lainnya.

Penyaluran bantuan pangan non tunai ini sendiri menggunakan fitur E-warong yang tersebar di banyak tempat, saat ini persebaran di Kota Medan semakin luas dan akan bertambah dari tahun ke tahun. Sistem penyaluran bantuan ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mana sebagai alat bukti ataupun transaksi untuk menukarkan ataupun mendapatkan bantuan pangan sesuai dengan jumlah dari bantuan yang telah diberikan. Pada awal tahun 2020 penukaran ataupun pengambilan bantuan BPNT ini dialihkan tidak lagi menggunakan fitur E warong dan KKS melainkan dari kantor pos yang mana setiap adanya bantuan yang keluar maka keluarga penerima manfaat akan diberikan barkot yang menandakan bahwa mereka terdaftar dalam penerima bantuan sehingga dana dapat dicairkan. Pengeluaran dana ini terjadi setiap tiga bulan sekali sehingga jumlah yang akan diterima keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 600.000. per keluarga.

Peralihan dari E-warong ke kantor pos tidak semata mata tanpa alasan hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan dimana adanya persaingan antara pihak ketiga atau E-warong, bahkan kecurangan yang dilakukan E-warong itu sendiri dimana melebihi nominal ataupun pengurangan harga bantuan tersebut sehingga keluarga penerima manfaat yang menukarkan bantuan tersebut rugi dan barang yang diterima pun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Seharusnya bantuan yang diberikan pemerintah sampai ke tangan penerima sesuai dengan apa yang diwajibkan, saat ini item yang diwajibkan

pemerintah yang dapat diterima KPM adalah beras dan telur yang mana merupakan bahan pokok yang bernutrisi dan bergizi namun nyatanya banyak E-warong yang melakukan penukaran item wajib tersebut, mereka menukarkan menjadi bahan pangan lain yakni minyak goreng bahkan menukarkannya dengan sabun. Hal lain masih banyak keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan tersebut dan tidak terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat sehingga penyaluran bantuan tersebut tidak merata dengan demikian dibutuhkan evaluasi terhadap program tersebut apakah sudah berjalan dengan baik ataupun apa saja faktor penghambat dari program tersebut yang mana akan menjadi saran serta jawaban dalam penyelesaian masalah bantuan tersebut. Dengan demikian hal ini cukup menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan tersebut.

Berjalannya sebuah kebijakan maupun sebuah program tentu tidak luput dengan yang namanya evaluasi, dimana evaluasi ini sebagai perbaikan ataupun pengontrol dalam berjalannya program tersebut. Evaluasi sendiri sebagai tolak ukur yang digunakan untuk memberikan penilaian kepada pemerintah maupun stakeholder selaku membuat kebijakan ataupun program. Didalam evaluasi terdapat kriteria dalam pengujian sebuah kebijakan ataupun program yakni (1) efektivitas, (2) kecukupan, (3) pemerataan, (4) responsivitas, (5) ketepatan. Berdasarkan indikator tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian, terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai dengan judul “ **Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Gedung Johor**” peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel di Kelurahan Gedung Johor yang mana merupakan bagian dari kecamatan

Medan Johor. Evaluasi dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan program tersebut yang akan menjadi input dalam perbaikan maupun pembuatan kebijakan serta program baru kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis maka terdapat permasalahan yang menjadi bahan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yakni

1. Bagaimana Evaluasi program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Gedung Johor?
2. Apa saja hambatan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Gedung Johor?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penulisan terutama penulisan untuk melakukan penelitian maka ada tujuan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Mengetahui evaluasi program bantuan pangan non tunai dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan gedung johor apakah sudah efektif dan berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Gedung Johor.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian yang dilakukan semaksimal mungkin oleh penulis tentu memiliki manfaat baik informasi yang aktual dan factual serta menjadi pembelajaran baik untuk penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis yakni:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik serta kebijakan public, yang mana penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun referensi serta informasi ilmiah untuk penelitian kedepannya.
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang menjadi masukan yang berguna terhadap instansi yang berkaitan.
3. Secara Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberkaya penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa bagi program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya tulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Program

Kata *Evaluation* merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris kemudian kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengurangi maknanya. Evaluasi sendiri merupakan pengertian “pengukuran” yang mana mengacu kepada kegiatan untuk membandingkan. Secara etimologi sendiri kata, evaluasi berarti penilaian sehingga dengan demikian mengevaluasi adalah pemberian penilaian ataupun menilai (kamus besar Indonesia, 1995). Sedangkan dalam *kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English*, menambahkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan hati-hati, penuh rasa tanggung jawab, menggunakan strategi serta diberkati pertanggung jawaban (*evaluation is to find out, decide the amount or value*).

Dalam pengertian lainnya evaluasi sendiri merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga dalam sebuah hal dan sejalan dalam pencarian tersebut akan diikuti informasi yang bermanfaat yang mana akan berguna untuk menilai suatu program, produksi, produser, serta alternative strategi lainnya yang akan diajukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Suharsimi 2006). Dalam buku evaluasi program Farida Yusuf Tayibnafis beliau mengutip perkataan Ralph Tyler bahwa Evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dalam setiap program dapat tercapai. Dengan demikian evaluasi program adalah sebuah proses ataupun kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan beberapa cara salah satunya adalah

efektifitas, yang akan menentukan apakah output dan outcomes yang diharapkan dari program terealisasi dengan baik.

Penting untuk diperhatikan dalam mendefinisikan penelitian evaluasi bahwa penelitian evaluasi berbeda dari penelitian dasar. Penelitian evaluasi adalah suatu bentuk penelitian terapan atau "penelitian tindakan" karena dapat berkontribusi pada tindakan sosial, tetapi tanpa menilai efek dari intervensi tertentu dalam suatu program oleh peneliti. Hal ini berkaitan dengan teori dasar dan desain penelitian, tetapi fungsi utamanya adalah untuk mengevaluasi secara komprehensif aktivitas tertentu dan, yang penting, untuk memenuhi tenggat waktu lembaga. Penelitian evaluasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, tidak hanya sebagai sarana untuk meningkatkan program. Kadang-kadang evaluasi dilakukan untuk membenarkan atau mendukung program yang sedang berjalan dan kadang-kadang untuk menyelidiki atau mengaudit program untuk menyalahkan kegagalan, menghapusnya, mengubah kepemimpinan, atau membatasi kegiatannya. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kurniawan (2021) beliau menyatakan bahwa sebuah kebijakan program yang telah dilaksanakan haruslah diukur dengan cara evaluasi sehingga hasil yang akan tercapai dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau hasil tersebut jauh menyimpang dari yang diharapkan. Selain itu dengan adanya evaluasi para pembuat kebijakan atau stakeholder mendapat masukan dalam proses pengambilan kebijakan yang akan datang sehingga tidak mengulang kembali kesalahan yang telah dibuat dalam kebijakan yang lampau.

Dunn (2003) menyatakan bahwa evaluasi memberikan informasi yang valid yang dapat dipercaya mengenai kinerja sebuah program atau kebijakan yakni seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai dengan tindakan public, evaluasi juga memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan serta target dan evaluasi memberikan sumbangan untuk metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Pada dasarnya evaluasi tidak bisa dilakukan apabila tanpa monitoring hal ini karena tidak mempunyai data dasar untuk melakukan analisis karena evaluasi merupakan penyimpulan dan tindakan-tindakan dari monitoring yang dilakukan. Oleh karena itu terjadi sinergitas antara monitoring dengan evaluasi yang berjalan seiringan sehingga tidak perlu melakukan pengulangan proses dan pekerjaan.

2.1.1 Model Evaluasi Program.

Model evaluasi merupakan sebuah desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan nama pembuatnya dan sebelum melakukan evaluasi tentu memikirkan dengan jelas dan penuh pertimbangan model evaluasi apa yang akan digunakan (Tayibnapi 2018). Ada banyak model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi sebuah program. Meskipun model yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan baik kekurangan maupun kelebihan namun tujuannya tetap sama yakni mengumpulkan data serta informasi yang berkenaan dengan objek yang akan dievaluasi. Arikunto dalam bukunya menyatakan ada tujuh model evaluasi yang dapat menjadi acuan dalam evaluasi sebuah program diantaranya: *Goal Oriented Evaluation*, *Goal Free*

Evaluation, Formatif Summatif evaluation, Countenance Evaluation, CSE-UCLA Evaluation, CIPP Evaluation dan Discrepancy Model. Namun saat ini peneliti lebih memilih model evaluasi yang dikemukakan oleh dunn yang mana lebih sesuai dengan konteks permasalahan yang akan diteliti adapun indicator yang dikemukakan oleh dunn sebagai berikut:

Table 2.2 Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Kriteria	Pembahasan
1	Efektivitas	Hasil apa saja yang tercapai apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan?
2	Kecukupan	Hasil yang didapatkan apakah dapat memecahkan sebuah masalah?
3	Pemerataan	Apakah distribusi manfaat dan biaya telah didistribusikan ke masyarakat kelompok yang berbeda?
4	Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan sudah memuaskan?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang didapat bermanfaat?

Sumber : AG Soebarsono 2005

Berkiblat dari penjelasan tabel diatas maka dipahami bahwa evaluasi kebijakan sangat dibutuhkan. Beberapa argument yang menjelaskan betapa pentingnya evaluasi kebijakan.

1. Mengetahui bagaimana keefektivitasan dalam kebijakan, yakni seberapa jauh dalam pencapaian tujuan.
2. Memahami apakah kebijakan gagal atau tidaknya dengan melihat keefektivitasan kebijakan yang ada
3. Memberitahu para stakeholder akan manfaat dalam kebijakan. Karena jika tidak dilakukan evaluasi dalam kebijakan maka tidak akan tahu pasti apa

manfaat dari sebuah program atau kebijakan serta mengurangi pengulangan kesalahan yang sama.

4. Memenuhi dari segi akuntabilitas publik. Melalui penilaian kinerja dalam kebijakan, sebagai suatu bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat

2.1.2 Tujuan Dan Manfaat Evaluasi Program

Dalam mengevaluasi tentu saja bertujuan untuk melihat pencapaian sebuah program dengan cara dengan melihat pelaksanaan program tersebut karena ketikan seseorang ingin mengetahui bagian mana saja dari program baik komponen dan subkomponen yang belum terlaksana serta penyebab hal tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Ada sepuluh alasan evaluasi perlu diperlukan mengutip pendapat Feurstein secara tidak langsung hal ini menjadi tujuan dari sebuah evaluasi program diantaranya:

1. Mengetahu kemajuan yang dikaitkan dengan tujuan program
2. Mengetahui apa yang sudah dicapai
3. Merciptanya manajemen yang baik
4. Menganalisis kekurangan serta kelebihan untuk memperkuat program
5. Mengetahui apa saja perbedaan yang sudah terjadi setelah diterapkannya program tersebut
6. Mengecek apakah biaya yang dikeluarkan sesuai atau raionable
7. Memperhitungkan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik lagi

8. Untuk memberikan dampak yang lebih luas
9. Memberikan kesempatan untuk mendapat masukan dari masyarakat dan,
10. Membantu pihak lain agar tidak jatuh ke permasalahan yang sama

Evaluasi program sangat erat dengan sebuah kebijakan karena program adalah rangkaian kegiatan realisasi dari kebijakan itu sendiri. Untuk itu apabila sebuah program tidak dievaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana kebijakan tersebut terlaksana dan bermanfaat. Untuk itu evaluasi sangat penting, ada empat hal yang kemungkinan akan terjadi apabila sebuah program tidak sejalan dengan sebuah kebijakan diantaranya:

1. Menghentikan program
2. Merevisi program
3. Melanjutkan program dan,
4. Menyebarkan program(konteksnya melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu)

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Relatifnya setiap negara menghadapi permasalahan yang sama yang membedakan dari semua hal tersebut bagaimana tanggapan ataupun respon yang pemerintah realisasikan dalam penyelesaian masalah tersebut, yang mana respon inilah yang disebut dengan kebijakan publik. Beberapa ahli/tokoh banyak menggunakan istilah public policy dan public policy analysis seperti William Dunn, Charles Jones dan lainnya. Kata *policy* sering dikaitkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintahlah

yang memiliki wewenang maupun kekuasaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan berkewajiban melayani kepentingan umum. Pada dasarnya kebijakan merupakan sebuah keputusan yang ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, serta untuk mencapai sebuah tujuan yang mana dilakukan oleh lembaga pemerintahan negara dan pembangun bangsa. Konsep kebijakan publik ini merupakan tahapan dimana mengandung tata kelola negara, yang mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Sejalan dengan perkataan Nugroho (2009) dimana pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara serta mengelolanya, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Dalam penyelenggaraan sebuah negara kebijakan public menempati posisi yang sangat vital karena kebijakan public merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan respon dari pemerintah terhadap suatu masalah yang ada dan mengandung sebuah tujuan tertentu. Rian Nugroho berpendapat bahwasannya kebijakan publik merupakan salah satu komponen dalam sebuah negara (Nugroho 2004). Menurut beliau ada empat komponen yang harus ada dalam sebuah negara yakni:

Komponen lembaga- lembaga negara seperti *eksekutif*, *legislative* dan *yudikatif*, Rakyat sebagai warga dari negara itu sendiri. Wilayah yang diakui kedaulatannya dan Kebijakan publik.

Menurut Dunn (2003), kebijakan merupakan sebuah sistem yang mana serangkaian bagian yang saling berhubungan, saling bergantung dan diatur dalam suatu aturan tertentu untuk menghasilkan suatu kesatuan. Dunn juga mengatakan sistem kebijakan publik mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur yakni kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Pernyataan dari ketiga unsur ini dimana kebijakan publik berisikan mengenai sejumlah daftar keputusan tentang urusan publik yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah dimana hal ini merupakan respon terhadap permasalahan publik yang mencakup berbagai bidang. Sedangkan pelaku kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat dipengaruhi maupun mempengaruhi oleh kebijakan tersebut. Dan lingkungan kebijakan merupakan latar khusus dimana sebuah kebijakan lahir yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktor serta kebijakan publik itu sendiri.

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan yang dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan yang semestinya. Biasanya kemiskinan didefinisikan sebagai mana suatu individu berada di tingkat standar minimal sebuah kehidupan yang dapat diterima dalam masyarakat atau komunitas. Menurut Munawar beliau berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multimedia yang didefinisikan serta diukur dalam banyak cara. Kasus kemiskinan sendiri telah diukur berdasarkan kesejahteraan ekonominya seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati (Maipita, 2013).

Kemiskinan sangat erat dengan adanya sebuah kebijakan sosial hal ini sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan karena sebuah kebijakan sosial muncul akibat adanya masalah sosial yakni kemiskinan. Pada Undang- Undang 13 tahun 2011 dijelaskan bahwa “fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya sendiri ataupun keluarganya”.

Menurut Jamaluddin (2017) mengatakan bahwa kemiskinan sebagai keadaan tidak mampu seseorang atau masyarakat yang mana diukur dalam standar hidup tertentu, juga mengacu pada konsep miskin relative yang melakukan analisis perbandingan di setiap negara baik negara miskin ataupun kaya. Konsep absolute dari kemiskinan sendiri adanya wabah kelaparan, ketidak mampuan untuk membesarkan maupun mendidik anak danlainnya. Dengan ini berdasarkan beberapa pandangan diatas maka pada hakikatnya kemiskinan merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan ekonominya saja. Untuk itu dalam program pemberdayaan masyarat harusnya tidak berfokus pada ekonomi saja namun juga dalam bidang sdmnya yang mana memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosialnya agar individu atau masyarakat mampu bertahan serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.3.1 Penyebab Kemiskinan

Pada dasarnya kemiskinan bersumber dari Sumber Daya Manusia (SDM) serta keadaan strukturalnya artinya bahwa dengan SDM yang rendah dengan tidak berpendidikan, kurangnya skill serta kreativitas yang minim, sehingga hal inilah yang membuat individu tidak dapat bersaing dengan individu lainnya. Keadaan diskriminasi atau keadaan structural, masyarakat miskin memiliki keterbatasan akses dan kesempatan dalam mengeksplor hal baru sehingga mereka hanya ada dilingkaran kemiskinan tanpa bisa keluar dari hal tersebut.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kartasasmita (Jamaluddin 2017: 225), beliau mengatakan penyebab dari kemiskinan tersebut adalah:

- a. Kesehatan yang buruk. Karena keadaan yang tidak mendukung maka gizi yang didapat sangat rendah yang mana hal inilah yang menyebabkan rendahnya ketahanan fisik, daya fikir serta prakarsa individu itu sendiri.
- b. Rendahnya taraf pendidikan. Dengan pendidikan yang terbilang rendah maka kemampuan dalam pengembangan diri dan mengekspor hal baru menjadi terbatas hal inilah yang menyebabnya sempitnya lapangan kerja yang bisa dimasuki karena tidak sesuai dengan kriteri yang perusahaan inginkan. Karena pendidikan sangat penting untuk bersaing dalam mencari pekerjaan.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Selain permasalahan kondisi fisik maupun pendidikan lapangan pekerjaan juga menjadi penyebabnya, lapangan pekerjaan yang semakin sedikit serta persaingan yang sangat kuat

sehingga hal ini berpeluang sangat sedikit bagi individu yang tidak mampu bersaing hal inilah yang membuat terjadinya kemiskinan.

- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Di tempat terpencil atau di daerah pedesaan umumnya berpendidikan rendah, sehingga produktivitas maupun pendapatannya rendah sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan mereka baik pangan, sandang, kesehatan pendidikan, tempat tinggal dan lainnya. Akibat dari ini semua maka terciptalah keluarga atau generasi generasi penerus yang tidak berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terjadi secara kompleks terutama di negara yang masih berkembang salah satunya Indonesia. Kemiskinan sendiri bisa terjadi dimana saja baik pedesaan maupun perkotaan. Untuk masalah kemiskinan perkotaan sebagai contoh yakni kota medan, kemiskinan diperkotaan paling terasa didaerah desa atau kelurahan seperti Kelurahan Gedung Johor. Salah satu penyebab kemiskinan ialah pendapatan rendah yang mana sangat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan dari segi pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan pemerintah kota medan adalah realisasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), demi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin di kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

2.4 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Upaya yang direalisasikan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dituangkan dalam sebuah program bantuan pangan non tunai (BPNT). Berdasarkan Peraturan Presiden RI No.63 Tahun 2017 mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial saerta mendorong keuangan inklusif. Upaya- upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sudah begitu banyak salah satunya adalah program- program yang menajdi solusi dalam membantu masyatakat yang terdampak kemiskinan. Kemiskinan yang dilanda menjadi hambatan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah kebutuhan pangan, sehingga dengan demikian pemerintah mulai menggalakkan program bantuan pangan yang bertujuan untuk meringankan masyarakatnya, agar masyarakatnya tidak kekurangan gizi dan mendapat nutrisi yang cukup. Program BPNT merupakan salah satu program dari sekian banyak program yang telah dikeluarkan pemerintah dimana program ini merupakan program yang membantu masyarakatnya dalam ketahanan pangan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan pengganti program Rasta/Raskin yang disalurkan secara non tunai atau melalui media pengganti yakni kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan setiap bulan. Dalam bantuan ini diperuntungkan untuk pembelian barang pokok saja saat ini pemerintah menetapkan kewajiban item dalam penyaluran bantuan ini adalah beras, telur, gula dll. Untuk pencairan

dana bantuan sosial dapat dilakukan dipihak ketiga yakni E-warong atau agen yang telah dipercaya atau berkerjasama dengan bank milik negara. System dari kartu elektronik ini seperti berikut Keluarga Penerima Manfaat akan menerima sebuah kartu yakni KKS yang bersistem Saving account/ E-wallet sehingga para penerima manfaat tinggal menukar bahan pokok sejumlah dengan uang yang ada di dalam kartu tersebut. apabila masih ada sisa maka uang tersebut akan tersimpan didalamnya dan bisa digunakan untuk pembelanjaan bulan depan, jadi tidak adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut. Pada tahun 2020 program BPNT ini mengalami penyempurnaan dan peningkatan efektifitas, dimana akibat dampak pandemik covid-19 yang membuat terhambatnya perekonomian masyarakat sehingga kemiskinan semakin meningkat maka pemerintah mulai menyempurnakan program tersebut, program BPNT ini mulai dialihkan menjadi tunai namun masih memiliki tujuan yang sama yakni ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat miskin di Indonesia. Pada program BPNT ini besaran manfaat yang diterima sekitar RP. 200.000,00/ bulan, adanya peningkatan nominal bantuan diharapkan dapat membantu masyarakatnya.

2.4.1 Tujuan, Manfaat, dan Prinsip Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan buku pedoman pengamalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana disusun oleh lembaga yang berkaitan seperti Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K serta kantor Staf Presiden.

Tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini sendiri adalah:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
2. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM)
3. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM)
4. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

1. Membangun ketahanan pangan keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Memperbaiki efisiensi penyaluran bantuan sosial
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi SNKI.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.\

Prinsip umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakni:

1. Memberikan akses jasa keuangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

3. Mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

2.4.2 Besaran Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan buku pedoman pengamalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana disusun oleh lembaga yang berkaitan seperti Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K serta kantor Staf Presiden. Sebelum adanya perubahan besaran manfaat yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM). Sebesar Rp.110.000,00/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di E-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik bantuan pangan. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT) berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi keluarga penerima manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi. Setelah adanya perubahan besaran manfaat yang diterima sejumlah Rp 200.000,00/ bulan dan pencairan dana tidak lagi dimenggunakan vitur E-warong melainkan melalui kantor pos dan berbentuk tunai, yang mana setiap tiga bulan sekali dana bantuan akan cair dan bisa diambil oleh Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dan menerima barkot dari kantor pos dan nominal yang diterima sebesar Rp

600.000,00. Tujuannya dari program tersebut masih sama dengan program sebelumnya yang membedakan hanya nominal dan berbentuk tunai saja.

2.4.3. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Adabeberapa regulasi yang mendasari dalam pembentukan program tersebut diantaranya:

1. UU No.13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. UU No.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT).
4. Perpres No.82/Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

2.5 Definisi Konsep

Konsep digambarkan sebagai sebuah abstrak dalam suatu kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang semua aspek tersebut berpusat pada ilmu sosial. Konsep sangat penting dalam sebuah penelitian karena konsep yang akan menghubungkan antara teori dan observasi serta antara abstraksi dengan realitas. Melalui konsep ini pula penyederhanaan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, untuk mempersempit dan memberikan batasan dari masing- masing konsep yang akan diteliti, maka peneliti mengemukakan defines konsep dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Evaluasi program adalah sebuah proses ataupun kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan beberapa cara salah satunya adalah efektifitas, yang akan menentukan apakah output dan outcomes yang diharapkan dari program terealisasikan dengan baik.
2. BPNT merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang direncanakan pemerintah dengan pesebaran disetiap desa- desa ataupun daerah yang mengalami kemiskinan dengan cara memberdayakan kelompok masyarakat melalui program e warong yang menjadi bagian dari program bantuan pangan non tunai (BPNT). Salah satu daerah yang menjadi tempat penyaluran bantuan tersebut adalah kota medan yakni kelurahan gedung johor.
3. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam bab ini terdapat beberapa teori yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan hasil penelitian. Selain menjelaskan teori bab ini juga menjelaskan review literatur jurnal yang diperoleh peneliti dari penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang sama yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berikut uraian yang dapat di lihat didalan table.

2.6 Penelitian terdahulu

Tabel 2.3 perbandingan beberapa penelitian

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Metode Penelitian & Teori Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Herman Susanto, 2016 Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan	Pendekatan kualitatif Teori evaluasi (CIIP)	Evaluasi program di Kecamatan Kebayoran lama sudah berjalan dengan baik terlihat dari proses kegiatan awal, pencairan dana, pemutakhiran data dan verifikasi data. Namun kekurangannya program PKH ini membuat KPM menjadi ketergantungan terhadap bantuan PKH tersebut dan kinerja antar lembaga internal maupun eksternalnya harus lebih diperhatikan kembali	Perbedaan dari penelitian ini dengan terdahulu bahwasannya program yang diteliti berbeda dimana penelitian ini meneliti mengenai program BPNT atau program sembako yang ada di Kelurahan Gedung Johor
2	Wiwit , 2020 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batu	Pendekatan kualitatif deskriptif Teori yang digunakan pendekatan meonitoring dan evaluasi dari William dunn	BPNT di kota Batu telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik dinilai telah tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. KPM Kota Batu sebanyak 5.649	Pada penelitian ini keadaan penduduk yang akan diteliti memiliki pendapatan menengah ke atas atau mampu sehingga hasil yang didapatkan pun akan terlihat berbeda dan KPM yang

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Metode Penelitian & Teori Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
			KPM pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM. Faktor penghambat dalam monitoring dan evaluasi program BPNT yaitu pertama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua yaitu waktu	terdaftar akan terlihat berbeda dan bagaimana sosialisasinya juga akan berbeda.
3	Sarifah Hanum, 2019 Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan kemiskinan di kecamatan Medan Johor	Pendekatan kualitatif Teori efektifitas Budiani 2007	Efektivitas pelaksanaan program BPNT belum cukup maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu pendataan awal yang dilakukan kepada KPM kurang tepat sasaran dan kurang merata, sehingga masih ada anggota KPM yang tidak sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Masih adanya KPM yang sering menghadapi saldo yang kosong, kurangnya pemahaman KPM terkait pengaduan tentang KKS yang bermasalah, dan	Perbedaannya dimana pada teori yang digunakan pada teori William dan efektifitas menjadi bagian dari evaluasi sehingga pembahannya lebih menjelaskan apa yang menjadikan program tersebut tidak efektif dan bagaimana penilaian program tersebut yang mana menjadi acuan agar program selanjutnya tidak seperti program sebelumnya.

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Metode Penelitian & Teori Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
			tidak keberlanjutannya sosialisasi yang dilakukan terkait program BPNT	
4	Heri Gunawan, 2019 Efektifitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) penerima manfaat terhadap kesejahteraan keluarga miskin di kelurahan glugur kota kecamatan medan barat	Kualitatif deskriptif Teori efektifitas program	Dalam perwujudan penyaluran BPNT secara efektif di kelurahan gelugur dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dimana bantuan ini sudah tepat sasaran dan tepat waktu sehingga masyarakatnya mendapat bantuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.	Penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian terdahulu membahas mengenai efektifitas maka penelitian saat ini akan membahas evaluasi yang mana lebih kompleks dan jelas dibandingkan dengan efektifitas saja
5	Daniar Seri Firdausi*, Diana Hertati, 2022 Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang	Pendekatan kualitatif Teori evaluasi kebijakan (William N Dunn)	BPNT di Desa Glagahan dalam pelaksanaannya dinilai belum optimal dan baik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada aspek efisiensi, pemerataan, tanggung jawab, dan ketepatan dinilai sudah baik dan tepat pelaksanaannya. Namun sayangnya pada efektivitas dinilai bahwa kurang tepatnya	Perbedaan yang ada bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus terhadap efektifitas saja namun banyak indikator yang akan diteliti sehingga akan melihat apakah program tersebut telah sesuai dengan tujuannya atau tidak.

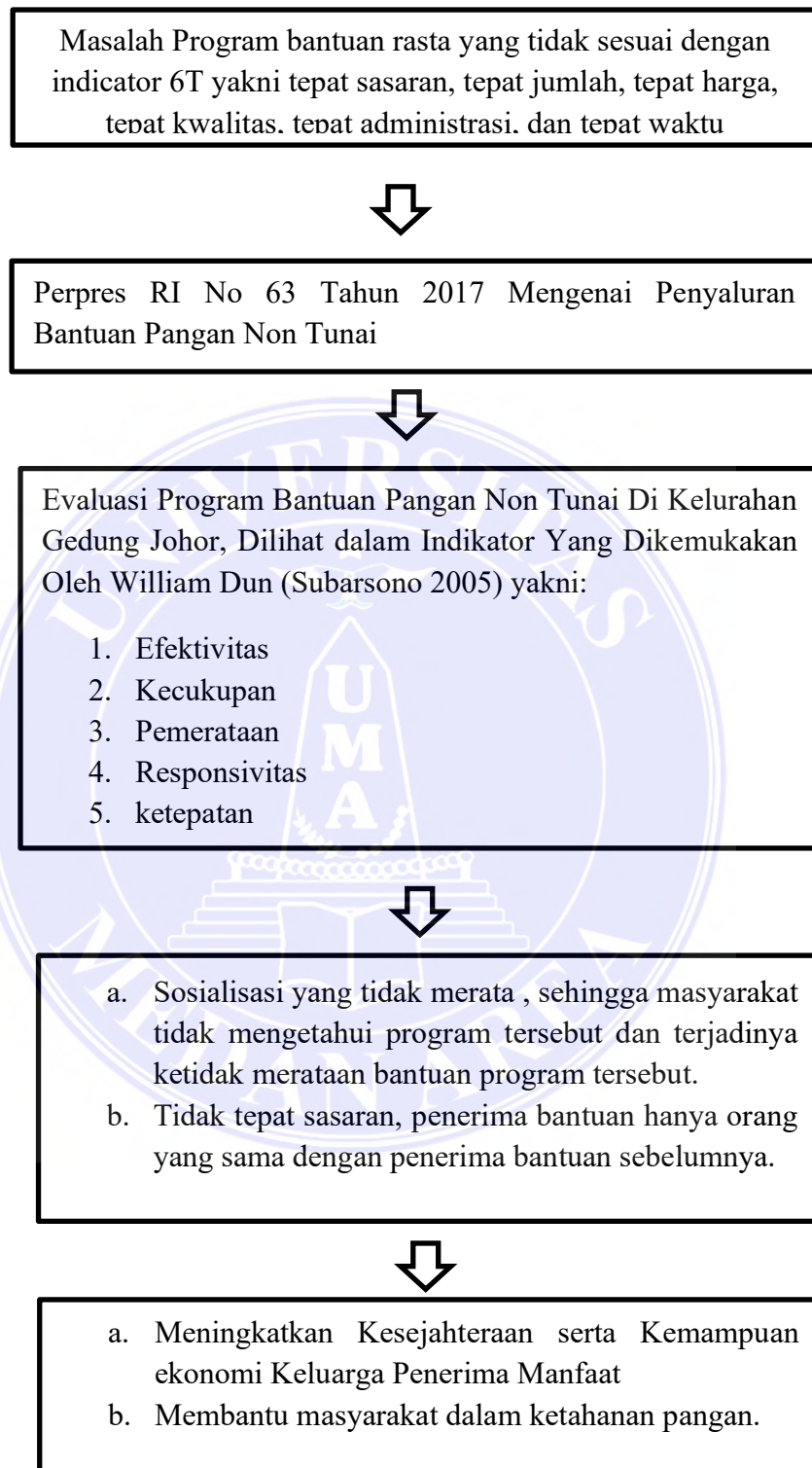
No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Metode Penelitian & Teori Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
			metode sosialisasi dan pemantauan yang belum dilakukan dengan baik. selain itu pada aspek fokus kecukupan dinilai BPNT hanya dapat memberikan manfaat secara terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup hingga periode bantuan selanjutnya.	

2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dibangun demi mempermudah peneliti, dimana kerangka berfikir ini menjadi pedoman atau sebuah gambaran yang akan menjelaskan tahapan demi tahapan dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu dalam kerangka pikiran ini penulis mulai menyusun tahapannya, dimana masalah kemiskinan menjadi masalah yang absolut bagi setiap negara tidak hanya Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang membahas penanganan fakir miskin dijelaskan bahwa salah satu bantuan yang dikeluarkan pemerintah adalah bantuan pangan. Yang mana sudah cukup banyak program yang direalisasikan pemerintah dalam ketahanan pangan salah satunya adalah program rastra. Sayangnya dalam pelaksanaannya banyak sekali penyimpangan yang terjadi salah satunya tidak terpenuhinya kriteria 6T yakni tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi, dan tepat waktu.

Setelah melakukan evaluasi yang mendalam maka pemerintah memberikan solusi terbaru dibentuklah program baru pengganti dari program sebelumnya yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program bantuan yang bertujuan untuk ketahanan pangan serta pemenuhan gizi yang lebih seimbang terhadap keluarga yang kurang ataupun tidak mampu. Hal inilah yang mendasari dibentuknya program tersebut, yang diharapkan dapat efektif dalam membantu keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan demikian penulis ingin melakukan evaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh William dunn, yakni efektifitas, ketepatan, pemerataan, kecukupan dan responsivitas. Indikator yang dikemukakan oleh William Dun ini digunakan sebagai penguji dari program tersebut. bagaimana efektifitas program bantuan pangan non tunai dalam penanggulangan kemiskinan, apakah sudah tepat sasaran kah penerima program bantuan ini, apakah sudah merata dalam persebaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah, bagaimana kah program ini memberikan manfaat terhadap masyarakat sudah cukupkah bantuan ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, dan terakhir bagaimana responsivitas dari program ini terhadap masyarakat berdampak cukup signifikan atau tidak. Setelah menguji program BPNT ini menggunakan indicator tersebut maka akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian evaluasi program BPNT ini. Kesimpulan tersebut akan memperjelas apa yang menjadi jawaban dari permasalahan yang ada dan kemudian dilanjutkan dengan sebuah solusi ataupun saran dari penulis. Untuk lebih memahami berikut kerangka berfikir yang penulis susun dilihat dari skema berikut

Bagan 2.4 Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian deskriptif menggunakan prosedur pemecahan masalah secara sistematis, akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang yang diteliti baik dari segi keadaan, permasalahan, sikap, pendapat kondisi, dan lainnya. Dikutip dari Sujarweni (2014), Strauss dan Corbin menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran (kuantitatif). Secara umum penelitian kualitatif sering digunakan untuk menguji tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, dan lainnya. Bogdan dan Taylor juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata yang ditulis yang mana tulisan ini berasal dari perkataan atau lisan individu yang perilakunya sedang diamati.

Pendekatan kualitatif juga diperuntungkan untuk menghasilkan uraian yang mendalam dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, holistic serta komprehensif. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dihasilkan tanpa melalui proses perhitungan (statistik) dan cara kuantifikasi lainnya. Dengan demikian penelitian *descriptive* ini akan membantu peneliti untuk mendeskripsikan evaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan Gedung Johor dengan melihat efektivitas penyaluran program tersebut, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan pangan tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperuntungkan untuk mempermudah ketika terjun kelapangan untuk mengumpulkan data. Dalam kasus Evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di kecamatan medan johor namun mempersempit jangkauan penelitian menjadi di kelurahan Gedung Johor. Kemiskinan di kota Medan terverifikasi menduduki peringkat tertinggi setelah enam kota lainnya yakni kota Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung dan kota Batam.

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kelurahan Gedung Johor yang mana memiliki wewenang dalam pengendalian dan pelaksanaan program BPNT di Kota Medan, serta kantor pos yang menjadi tempat penyaluran bantuan BPNT tersebut dari pemerintah ke masyarakat, sehingga hal inilah yang mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang faktual dan akurat.

3.3 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian akan ditetapkan dalam kurun waktu terhitung pada bulan Desember 2022 sampai Februari 2023. Jadwal berlangsung selama tiga bulan.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Aug 2023
1	Pengajuan Judul	■										
2	Penyusunan proposal		■	■								
3	Seminar proposal				■							
4	Perbaikan Proposal				■							
5	Penelitian					■	■	■	■			
6	Penyusunan skripsi						■	■	■	■		
7	Seminar hasil									■	■	
8	Perbaikan skripsi									■	■	
9	Sidang meja hijau											■

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam sebuah penelitian diperuntungkan untuk mendapatkan informasi secara maksimal. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penentuan informan menggunakan teknik yang mana tekni ini berupa *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik – teknik ini juga memiliki perbedaan yang mana *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita pertanyakan atau mungkin seseorang yang memiliki wewenang dan kuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi atau objek yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlah awal belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti membutuhkan orang orang ataupun regulasi yang memang berkecimpung di dalam program tersebut agar data yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan fakta yang ada. Sebagai gambaran orang orang

tersebut penulis menguraikan beberapa informan. informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama dalam penelitian ini maka informan kuncinya adalah lurah di Kelurahan Gedung Johor
2. Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari dan untuk informan utama dalam penelitian ini adalah Pendamping sosial Kelurahan Gedung Johor.
3. Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci dan dalam penelitian ini informan tambahan meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta kantor pos.

3.5 Teknik pengumpulan data

Data merupakan gambaran atau keterangan suatu fakta yang dapat dideskripsikan dimana pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data

yang terbagi dalam dua kelompok yakni secara interaktif (wawancara, observasi dll) dan noninteraktif (dokumen, jurnal dan arsip) adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, cara memperolehnya bisa melalui wawancara, observasi dokumentasi dan lainnya, biasanya peneliti memilih individu- individu tertentu yang sesuai dengan kriteria dalam penelitiannya agar tercapai tujuan dari penelitian tersebut.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari arsip, dokumen, open source yang sudah dalam bentuk jadi juga kepustakaan.

Dengan demikian peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik triangulasi (gabungan) berupa Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian Kualitatif menganalisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dimana saat mewawancarai narasumber peneliti telah mulai menganalisis terhadap apa yang disampaikan dan menjawab apa saja yang dipertanyakan oleh peneliti sampai batas tertentu dan mendapat jawaban yang dianggap cukup kredibel. Menurut Miles dan Huberman (Sutopo, 2006) mengatakan dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang benar- benar harus diperhatikan maupun dipahami oleh penelitian kualitatif. Tiga komponen tersebut yakni:

1. Data Reduction

Komponen yang pertama ini merupakan proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan dan abstraksi dari segala jenis informasi yang ada di lapangan. Dalam tahap ini juga peneliti mulai menyederhanakan dan memilah-milah data mentah yang berhasil dikumpulkan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Data yang terpilih hanyalah data yang relevan dengan penelitian yang diangkat yakni evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan gedung johor.

2. Data display

Komponen ini adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang kemungkinan akan menghasilkan kesimpulan dan pemberian tindakan. Berikutnya penyajian data penelitian berupa teks tulisan bersifat naratif, bagan ataupun berupa tabel yang dapat memudahkan peneliti dalam mengambil langkah selanjutnya.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan berangkat dari rumusan dan tujuan penelitian yang telah dianalisis kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Selain itu kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dari wawancara, observasi studi dokumentasi sehingga menjamin signifikansi dari hasil penelitian tersebut. pengambilan keputusan dalam permasalahan ini berkaitan dengan evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan gedung johor.

Dengan demikian dalam penyajian datanya dimulai dengan menelaah dan menganalisis sesuai dengan kemampuan penalaran penulis dalam membuat kesimpulan penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, mulai dari wawancara hingga hasil observasi maka pada bab ini penulis menarik suatu kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran terkait dengan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Gedung Johor. Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi focus penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

1. Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai yang ada di kelurahan gedung johor maka dari lima indicator yang menjadi acuan dalam pengujian program bantuan pangan non tunai yang menjadi jawaban dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka terdapat 3 (tiga) indicator yang belum cukup maksimal dalam pelaksanaannya serta terdapat 2 (dua) indicator yang telah dilakukan secara maksimal dengan kata lain hasil dari evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Gedung Johor belum berjalan dengan efektif. Hasil keseluruhan ini menemukan bahwa lima Indokator tersebut dalam pengujiannya terdapat tiga indicator yang tidak berjalan dengan efektif atau sesuai dengan apa yang ditujukan. Ketidak Efektifan dengan penyaluran yang

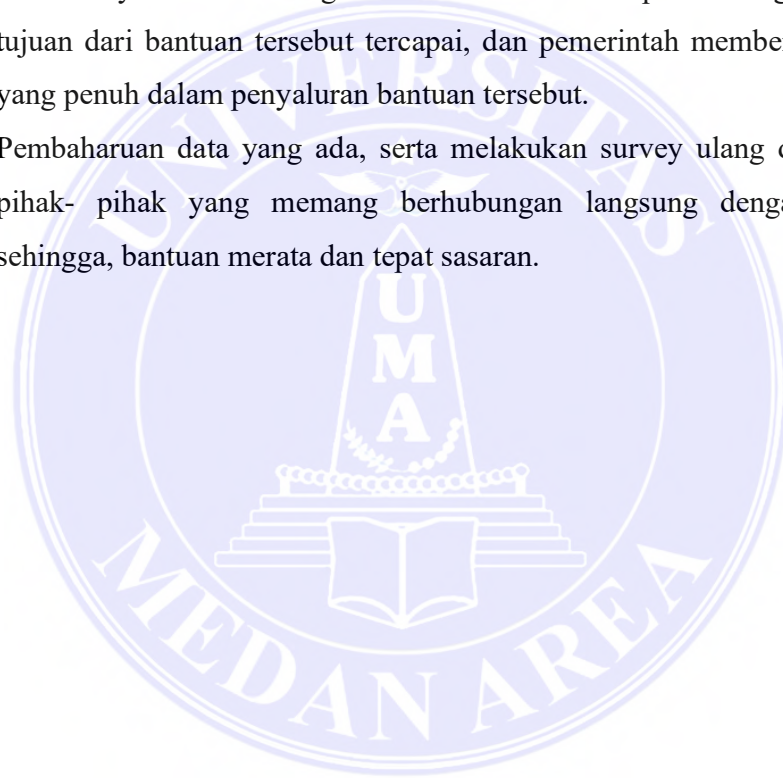
tidak tepat waktu, selain itu pada aspek fokus kecukupan dinilai BPNT hanya dapat memberikan manfaat secara terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup hingga periode bantuan selanjutnya, serta pemerataan bantuan menjadikan program tersebut tidak berjalan dengan baik.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hambatan yang terdapat pada penyaluran bantuan pangan tersebut berada pada pemerintah, hal ini disimpulkan berdasarkan aspek penelitian yang menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat besar dalam pemberian bantuan tersebut mulai dari, pengawasan, pemberian bahkan perekrutan penerima bantuan semua berada pada pihak pemerintah sehingga banyaknya tugas yang didapat sehingga terjadi beberapa ketidak efektifan dalam penyaluran bantuan pangan tersebut. Mulai dari pemerataan, kecukupan serta keefektifan penyaluran bantuan tersebut, hal inilah yang menjadikan keberhasilan dalam penyaluran bantuan terhambat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut rekomendasi yang penulis berikan berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Gedung Johor:

1. Dengan tujuan membantu ketahanan pangan masyarakat maka pemerintah mulai memberikan bantuan satu bulan sekali dan terjadwal sehingga masyarakat dapat menggunakan bantuan tersebut dan memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan pangan
2. Kembalinya bantuan dengan memberikan bahan pokok langsung sehingga tujuan dari bantuan tersebut tercapai, dan pemerintah memberikan perhatian yang penuh dalam penyaluran bantuan tersebut.
3. Pembaharuan data yang ada, serta melakukan survey ulang dibantu dengan pihak- pihak yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga, bantuan merata dan tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Evaluasi program pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan, Edisi kedua, Cet 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.*
- Angelia, N. Royanti, R. Masitho, B. (2021). *Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Tingkat Kelurahan.*
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2015. *Pedoman Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus 2005. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik*
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press*
- Deliana, M. Jamil, B. Simamora, B. (2022). *How North Sumatra is Dealing with Covid-19. IEOM Society International.*
- Daniar Seri Firdausi, D. H. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.*
- Hanum, S. (2019). *Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan kemiskinan di kecamatan Medan Johor.*
- Heri Gunawan, 2. (2019). *Efektifitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) penerima manfaat terhadap kesejahteraan keluarga miskin di kelurahan glukur kota kecamatan medan barat. Medan .*
- Haughton, Jonathan & Khandker, Shahidur R. 2009. *Handbook on Poverty + Inequality. World bank Publication.*
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. 2017. *Sosiologi Perkotaan. Bandung: Pustaka Setia*
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.*
- Maipita, Indra. 2013. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.*

- Nigro, Felix A & Nigro, Lloyd G 2016. *Modern Public Administration*. New York: Harper & Row inc.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Riant, Nugroho D, 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Soemitro, Sutyastie dan Priyono Tjiptoheri 2002. *Kemiskinan Dan Ketidak Merataan Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, Herman. 2016. *Evaluasi Program PKH Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan*
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Susanto, H. (2016). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan*. Jakarta selatan.
- Wiwit. (2020). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batu*.
- Yusuf, Farida Tayibnaps .2018. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Program Pendidikan Dan Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.

Undang- undang dan Peraturan pemerintah

Undang- undang No 13 Tahun 2011 mengenai Penangan Fakir Miskin

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang pemerintah daerah

Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

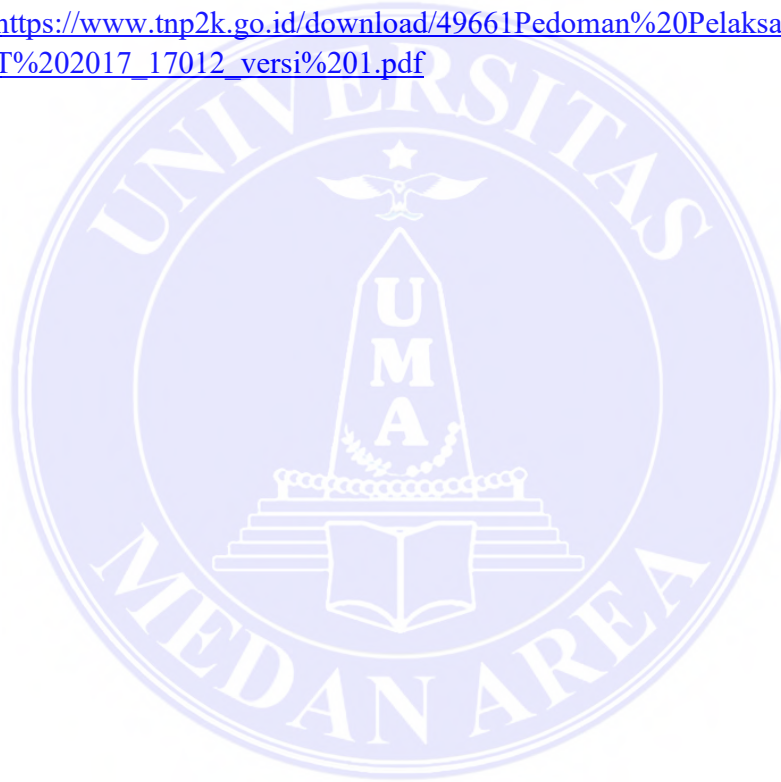
Peraturan Walikota Medan nomor 33 tahun 2021 yang membahas mengenai kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu

Suber Internet

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 2017. Jakarta :

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI.

https://www.tnp2k.go.id/download/49661Pedoman%20Pelaksanaan%20BPNT%202017_17012_versi%201.pdf



LAMPIRAN DOKUMNTASI

Gambar 4.2 Kantor Kelurahan Gedung Johor



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2023

Gambar 4.3. Kantor Pos Sebagai Tempat Penyalur Bantuan BPNT



Sumber: Dokumentasi penelitian, 2023

Gambar 4.4 Wawancara Bersama Ibu Sri Selaku Sekretaris Kelurahan Gedung Johor



Sumber: Dokumentasi penelitian,2023

Gambar. 4.5 Wawancara Dengan Ibu Rina Selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Gedung Johor



Sumber: Dokumentasi penelitian,2023

Gambar 4.6 Wawancara Dengan Ibu Rika Selaku Kepling LK VIII



Sumber: Dokumentasi penelitian,2023

Gambar 4.7 Wawancara Dengan Ibu Hanum Selaku Kepling LK IV



Sumber: Dokumentasi penelitian,2023

Gambar 4.8 Wawancara Dengan Ibu Suarni (Keluarga Penerima Manfaat)



Sumber: Dokumentasi penelitian,2023

Gambar 4.9 Wawancara Dengan Ibu Imas (Keluarga Penerima Manfaat)



Gambar 4.10 Wawancara Dengan Ibu Fitri (Keluarga Penerima Manfaat)



PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAH

NO	INDIKATOR EVALUASI	PEDOMAN WAWANCARA	INFORMAN PENELITIAN
1	Efektivitas Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari Program BPNT ? 2. Apakah ada kendala yang dihadapi kelurahan Gedung Johor dalam proses sasaran Program BPNT ? 3. Sebelum adanya Program BPNT terlaksana, apakah masyarakat sudah disurvei oleh tim pendamping ? 4. Apakah Program ini sudah Efektif dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Gedung Johor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sri Surya Ningsih SE Selaku Sekretaris keurahan Gedung johor 2. Rina M Simatupang SE Selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Gedung Johor 3. Rika Novita Selaku Kepala Lingkungan LK VIII 4. Khairita hanum Selaku Kepala Lingkungan LK IV
2	Kecukupan Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Program BPNT yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup dari segi nominal? 2. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ? 3. Apakah dengan adanya program BPNT mampu membawa masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sri Surya Ningsih SE Selaku Sekretaris keurahan Gedung johor 2 Rina M Simatupang SE Selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Gedung Johor 3 Rika Novita Selaku Kepala Lingkungan LK VIII

NO	INDIKATOR EVALUASI	PEDOMAN WAWANCARA	INFORMAN PENELITIAN
		lebih sejahtera ?	4 Khairita hanum Selaku Kepala Lingkungan LK IV
3	Pemerataan Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pendataan masyarakat miskin sudah secara menyeluruh sebagai penerima BPNT di keluraha Gedung Johor? 2. Bagaimana pendapatan masyarakat di Kelurahan Gedung Johor 3. Bagaimana jika masih ada masyarakat yang tidak mampu tidak terdaftar kedalam penerima BPNT ini? 4. Kategori masyarakat yang bagaimana yang menjadi penerima program BPNT ? 5. Apakah masyarakat penerima bantuan menerima bantuan dari program lain selain BPNT? 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sri Surya Ningsih SE Selaku Sekretaris keurahan Gedung johor 2 Rina M Simatupang SE Selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Gedung Johor 3 Rika Novita Selaku Kepala Lingkungan LK VIII 4 Khairita hanum Selaku Kepala Lingkungan LK IV
4	Responsivitas Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program BPNT ? 2. Apakah dampak yang diperoleh penerima BPNT dalam jangka waktu penjang dengan adanya program 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sri Surya Ningsih SE Selaku Sekretaris keurahan Gedung johor 2 Rina M Simatupang SE Selaku Kasi Pembangunan

NO	INDIKATOR EVALUASI	PEDOMAN WAWANCARA	INFORMAN PENELITIAN
		<p>BPNT ini?</p> <p>3. Apakah masyarakat penerima bantuan membelanjakan uang bantuan untuk kebutuhan pokok?</p> <p>4. Adakah perbedaan program BPNT dengan program lainnya terhadap masyarakat?</p>	<p>Kelurahan Gedung Johor</p> <p>3 Rika Novita Selaku Kepala Lingkungan LK VIII</p> <p>4 Khairita hanum Selaku Kepala Lingkungan LK IV</p>
5	Ketepatan Sasaran	<p>1. Apakah Program BPNT sudah tepat sasaran?</p> <p>2. Target sasaran masyarakat yang seperti apa untuk menjadikan masyarakat sebagai penerima program BPNT?</p> <p>3. Apa saja langkah-langkah yang dijalankan Kelurahan Gedung Johor apabila sasaran Tidak tercapai</p> <p>4. Kelurahan Gedung Johor bekerjasama dengan pihak mana saja untuk pelaksanaan bantuan BPNT ini agar terlaksana dengan maksimal?</p> <p>5. Upaya apa yang dilakukan masyarakat jika terjadi keterlambatan penyaluran Program BPNT ?</p>	<p>1 Sri Surya Ningsih SE Selaku Sekretaris keurahan Gedung johor</p> <p>2 Rina M Simatupang SE Selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Gedung Johor</p> <p>3 Rika Novita Selaku Kepala Lingkungan LK VIII</p> <p>4 Khairita hanum Selaku Kepala Lingkungan LK IV</p>

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

NO	INDIKATOR EVALUASI	PEDOMAN WAWANCARA	INFORMAN PENELITIAN
1	Efektivitas Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum adanya Program BPNT terlaksana, apakah masyarakat sudah disurvei oleh tim pendamping ? 2. Apakah program ini sudah efektif dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat? 3. Berapa lama jangka waktu bantuan tersebut di berikan kepada masyarakat? 4. Apakah program BPNT ini membuat masyarakat ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan? 	<p>Keluarga penerima manfaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Suarni 2. Ibu Imas 3. Ibu fitri
2	Kecukupan Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Program BPNT yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup dari segi nominal? 2. Apakah tujuan BPNT sudah berhasil dalam melaksanakan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat ? 3. Apakah dengan adanya program BPNT mampu membawa masyarakat lebih sejahtera ? 	<p>Keluarga penerima manfaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Suarni 2. Ibu Imas 3. Ibu fitri
3	Pemerataan Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pendataan masyarakat tidak mampu sudah secara menyeluruh sebagai penerima BPNT di keluraha Gedung Johor? 2. Bagaimana jika masih 	<p>Keluarga penerima manfaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Suarni 2. Ibu Imas 3. Ibu fitri

NO	INDIKATOR EVALUASI	PEDOMAN WAWANCARA	INFORMAN PENELITIAN
		<p>ada masyarakat yang tidak mampu tidak terdaftar kedalam penerima BPNT ini?</p> <p>3. Kategori masyarakat yang bagaimana yang menjadi penerima program BPNT ?</p> <p>4. Apakah masyarakat penerima bantuan mendapatkan bantuan dari program lain selain BPNT?</p>	
4	Responsivitas Program	<p>1. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya Program BPNT ?</p> <p>2. Apakah masyarakat memberikan keluhan apabila terjadi keterlambatan dalam penyaluran BPNT tersebut?</p> <p>3. Apakah masyarakat penerima bantuan membelanjakan uang bantuan untuk kebutuhan pokok?</p> <p>4. Adakah perbedaan program BPNT dengan program lainnya terhadap masyarakat?</p>	<p>Keluarga penerima manfaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Suarni 2. Ibu Imas 3. Ibu fitri
5	Ketepatan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Program BPNT sudah tepat sasaran? 2. Target sasaran masyarakat yang seperti apa untuk menjadikan masyarakat sebagai penerima program BPNT? 3. Upaya apa yang dilakukan masyarakat 	<p>Keluarga penerima manfaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Suarni 2. Ibu Imas 3. Ibu fitri

NO	INDIKATOR EVALUASI	PEDOMAN WAWANCARA	INFORMAN PENELITIAN
		<p>jika terjadi keterlambatan penyaluran Program BPNT ?</p> <p>4. Apakah dampak yang diperoleh penerima BPNT dalam jangka waktu penjang dengan adanya program BPNT ini?</p>	

